

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang berjudul Isu Politik Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Politik Penulis Opini ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif penulis opini mengenai isu keistimewaan Yogyakarta dari sudut pandang politik dalam surat kabar harian lokal. Penelitian ini sekaligus menggambarkan bagaimana kecenderungan opini yang terbentuk. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 38 artikel opini yang dihimpun dari tiga surat kabar lokal: SKH Kedaulatan Rakyat, SKH Radar Jogja dan SKH Bernas pada periode Desember 2010 – Januari 2011. Dalam penelitian ini, fenomena komunikasi politik tercermin dalam artikel opini sebagai berikut.

1. Isu Politik. Isu-isu politik keistimewaan Yogyakarta dari perspektif penulis opini dalam artikel opini yang dihimpun dari tiga surat kabar lokal Yogyakarta menunjukkan bahwa pembahasan keistimewaan Yogyakarta hanya terfokus pada persoalan politik, lebih spesifik lagi dalam konteks keberadaan keraton di dalam konstelasi politik. Kemudian diikuti padangan politik yang menghadirkan wacana desentralisasi di Yogyakarta. Sedangkan pembahasan politik lainnya seperti isu pengelolaan tanah di DIY tidak banyak disinggung penulis opini. Ini dikuatkan dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa dari sudut pandang masyarakat sosok Sultan menjadi salah satu alasan utama mengapa Yogyakarta berpredikat

istimewa. Dalam konteks keistimewaan DIY, keberadaan keraton dan Sultan menyedot perhatian khalayak yang paling besar yang dikaji dari berbagai sudut pandang (sejarah, konstitusi, dampak sosial). Hal ini tidak sejalan dengan masalah politik lainnya seperti politik pengelolaan tanah di Yogyakarta dan wacana desentralisasi dalam keistimewaan Yogyakarta. Masalah pertanahan tidak banyak diangkat penulis opini seiring dengan masih fokusnya pembahasan mekanisme pemilihan gubernur oleh pemerintah. Dari segi isi opini, isu pertanahan masih dijelaskan pada permukaan saja belum menyentuh realitas lain yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pembahasana desentralisasi telah cukup menyeluruh dipaparkan meskipun secara kuantitas tidak begitu banyak ditampilkan.

2. Penulis Opini. Sama halnya dengan karakteristik media di mana sifat khalayaknya majemuk dan tidak terbatas, maka penulis opini yang menuangkan pendapatnya dalam rubrik opini berasal dari berbagai kalangan. Penulis opini mengenai persoalan keistimewaan DIY masih didominasi oleh kalangan akademisi dan pejabat pemerintah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor politis dan sosiologis. Akademisi memiliki keterlibatan dalam memberikan alternatif rancangan UU kesitimewaan, selain dekat dengan dunia penelitian akademisi memiliki banyak referensi sehingga dapat memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian persoalan tersebut. Sedangkan pejabat pemerintah menjadi bagian atau pihak (*stakeholder*) penentu kebijakan atas tercapainya *goal* UUK DIY.

3. Kecenderungan opini. Kecenderungan tulisan opini dari ketiga surat kabar lokal menunjukkan loyalitas penulis opini diberikan kepada pihak Sultan, ini

dilihat dari kecenderungan isi opini yang bernada kritikal kepada pemerintah pusat. Dari sikap politiknya terkait dengan permasalahan mekanisme pengisian jabatan gubernur, penulis opini cenderung ke arah netral namun selisihnya tidak begitu terpaut jauh jika dibandingkan dengan suara yang menyetujui mekanisme penetapan. Mekanisme pengisian jabatan dengan pemilihan (Pemilukada) menuai suara cukup kecil.

Dari uraian di atas, pandangan politik dan kecenderungan opini memiliki korelasi dengan institusi surat kabar di mana artikel opini tersebut diterbitkan. Faktor eksternal (orientasi atau pendirian surat kabar) memiliki peran dalam pembentukan hasil akhir artikel opini. Dapat dilihat bahwa secara tidak langsung artikel-artikel opini di surat kabar tidak lepas dari campur tangan otoritas institusi media (koredaksian surat kabar) dengan pertimbangan tujuan dan sikap dari media itu sendiri.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan ,maka saran dan evaluasi bagi penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini mengkaji masalah keistimewaan DIY dari sudut pandang politik. Isu-isu politik keistimewaan DIY diadopsi dari pemikiran atau hasil penelitian sebelumnya oleh IRE (*Institute of Research and Empowerment*) Pers yang terdiri dari tiga pandangan utama politik dalam pembahasan kesitimewaan Yogyakarta. Pada dasarnya perspektif politik terkait permasalahan ini cukup bervariasi (tidak hanya terbatas pada isu populer tersebut). Kekurangan penelitian ini, pengkajian sudut pandang politiknya kurang menyeluruh dan masih

dimungkinkan untuk dijabarkan kembali lebih rinci apa saja aspek-aspek politik lainnya dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.

2. Penelitian ini menggunakan teknik tabulasi silang untuk melihat kecenderungan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, tabulasi silang dilakukan hanya antara dua variabel, namun demikian masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan tabulasi silang dengan tiga variabel sekaligus untuk mendapatkan hasil atau temuan yang lebih detil. Contoh, tabulasi silang antara variabel tema politik, arah opini dan penulis opini.

3. Tentang sikap media, penelitian ini akan lebih baik jika peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pihak bersangkutan (redaksional) dari masing-masing media atau melakukan riset tentang editorial (jika belum ada referensi riset editorial sebelumnya) terlebih dahulu. Hal tersebut bisa memperkuat landasan analisis dan temuan penelitian.

4. Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam keredaksian institusi media untuk mengembangkan materi baik dari segi pemberitaan maupun editorial mengenai isu keistimewaan Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Birowo, Antonius. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gitanyali.
- Bond, F. Fraser. 1961. *An Introduction to Journalism*. Second Edition. USA: Mac Milani.
- Budiman, Arief,dkk. 1995. *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini Untuk Media Massa*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius bekerja sama dengan LP3Y.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chadwick, Bruce, Howard Bahr, Stan Albrecht.1991.*Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. IKIP Semarang Pers
- Djuroto, Totok dan Bambang Suprijadi. 2005. *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hendrowinoto, Nurinwa. 2003. *Pisowanan Ageng: Sri Sultan Hamengkubuwono X : Sebuah Percakapan*, Yogyakarta: Yogya Forum.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Mahir Menulis; Kiat Jitu Menulis Artikel Opini, Kolom dan Resensi Buku*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada.
- Mc Quail, Denis. 1991. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remadja Karya CV.

Riley, Sam G.1998. *The American Newspaper Columnist*. London: Praeger Publishers.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Susanto, Astrid.1974. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Binacipta.

Susanto, Astrid.1982. *Komunikasi Maasa*. Bandung: Penerbit Binacipta.

Suwardi, Harsono. 1993. *Peranan Pers dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

#### **Jurnal Skripsi / Jurnal penelitian**

Lloyd, Jennifer. "Editorializing Immigration: A Content Analysis of Op-Ed Columns" *Paper presented at the annual meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication, The Renaissance, Washington, DC, Aug 08, 2007 Online <APPLICATION/PDF>*. 2011-02-09

Prihardono, Bambang K.,(et-al). *Vox Populi, Vox Potissium : Mencari Keistimewaan Yogyakarta dari Perspektif Rakyat*. 2008. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wendha, Nalsri. *Opini Publik Figure Yogyakarta dalam Rubrik Aspirasi*

*Keistimewaan*. 2011. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Halley, Lidwina Chometa. 2009. *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik*

*Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nugroho, Kristianto. 2009. *Keistimewaan DIY di Harian Radar Jogja Periode 1*

*September-31 Oktober 2008*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **Daftar Pustaka Online**

<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25/365/> diakses pada Selasa 10

Mei 2011, 15.20 wib

<http://kr.co.id/web/details> dan

[www.bernasjogja.com/indeks.php?content=new&cat=864](http://www.bernasjogja.com/indeks.php?content=new&cat=864) diakses pada

21.06.2011

<http://www.digilib.uns.ac.id/upload/dukomen/9411006200509271.pdf> diakses

pada 21.06.2011

[www.umy.ac.id/ilmu-pemerintahan-tawarkan-rekomendasi-keistimewaan-](http://www.umy.ac.id/ilmu-pemerintahan-tawarkan-rekomendasi-keistimewaan-yogyakarta.html)

[yogyakarta.html](http://www.umy.ac.id/ilmu-pemerintahan-tawarkan-rekomendasi-keistimewaan-yogyakarta.html)

[http://www.allacademic.com/meta/p203144\\_index.html](http://www.allacademic.com/meta/p203144_index.html) diakses pada 10 Februari

2011



# LAMPIRAN



## CODING SHEET

Judul/ tgl :

Media :

Pengkoder :

1. Penulis opini

- [1] Pengamat/pemerhati
- [2] Akademisi
- [3] Pejabat pemerintah
- [4] Pegawai Nonpemerintah
- [5] Para ahli
- [6] Masyarakat

2. Perspektif Politik

- [1] Keberadaan Keraton dalam konstelasi politik
- [2] Politik pertanahan
- [3] Wacana desentralisasi dalam konteks keistimewaan

3. Isi artikel opini

- [1] Kritik
- [2] Saran
- [3] Harapan
- [4] Gabungan Kritik-Saran
- [5] Gabungan Kritik-Harapan
- [6] Gabungan Saran-Harapan

4. Arah artikel opini

- [1] Pro Penetapan
- [2] Kontra Penetapan
- [3] Netral

Tanda tangan,

Pengkoder

Peneliti dengan Interkoder I (Ariadne Nagathe)

No.Artikel	Unit Analisis dan Kategorisasi							
	Penulis Opini		Perspektif Politik		Isi Opini		Arah Opini	
	P	A	P	A	P	A	P	A
1	2	2	3	3	1	1	3	3
2	3	3	1	1	4	4	3	3
3	2	2	1	1	1	1	3	3
4	2	2	1	1	6	6	3	3
5	2	2	1	1	6	6	1	1
6	3	3	1	1	6	6	1	1
7	3	3	3	3	3	3	2	2
8	2	2	1	1	1	1	1	1
9	5	5	1	1	6	6	1	1
10	3	3	1	1	1	1	1	1
11	2	2	1	1	4	4	1	1
12	2	2	1	1	6	3	3	3
13	2	2	1	1	1	1	3	3
14	1	1	1	1	6	6	3	3
15	3	3	1	1	6	6	1	1
16	2	2	1	1	1	1	3	3
17	2	2	1	1	1	3	3	3
18	2	2	1	3	6	6	1	1
19	3	3	1	1	4	4	1	3
20	2	2	1	1	3	3	3	1
21	2	2	1	1	1	1	3	3
22	4	4	1	3	3	3	3	3
23	3	3	1	1	6	6	1	3
24	6	3	1	1	6	6	1	1
25	2	2	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	6	6	1	1
27	2	2	3	3	1	1	3	3
28	5	5	1	1	6	6	1	1
29	4	4	1	1	1	1	1	3
30	2	2	1	1	1	1	3	3
31	2	2	3	3	6	6	3	3
32	2	2	1	1	3	3	3	3
33	4	4	1	1	6	6	3	3
34	3	3	1	1	6	6	2	2
35	2	2	1	1	1	1	1	1

36	4	4	2	2	1	3	3	3
37	2	2	1	1	6	6	3	3
38	2	2	1	1	1	1	3	3
Total	N = 37		N = 37		N = 35		N = 34	



**Peneliti dengan Interkoder II (Putu Agus Adisuara)**

No.Artikel	Unit Analisis dan Kategorisasi							
	Penulis Opini		Perspektif Politik		Isi Opini		Arah Opini	
	P	A	P	A	P	A	P	A
1	2	2	3	3	1	1	3	3
2	3	1	1	1	4	4	3	3
3	2	2	1	1	1	3	3	3
4	2	2	1	1	6	6	3	3
5	2	2	1	1	6	6	1	1
6	3	3	1	1	6	6	1	1
7	3	3	3	3	3	3	2	1
8	2	2	1	1	1	1	1	1
9	5	5	1	1	6	3	1	1
10	3	3	1	3	1	1	1	1
11	2	2	1	1	4	4	1	1
12	2	2	1	1	6	6	3	3
13	2	2	1	1	1	1	3	3
14	1	6	1	1	6	6	3	3
15	3	3	1	1	6	6	1	1
16	2	2	1	3	1	1	3	3
17	2	2	1	3	1	1	3	3
18	2	2	1	1	6	3	1	1
19	3	3	1	3	4	4	1	1
20	2	1	1	1	3	3	3	3
21	2	2	1	1	1	1	3	1
22	4	1	1	1	3	3	3	3
23	3	3	1	1	6	3	1	1
24	6	6	1	1	6	6	1	1
25	2	2	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	3	6	6	1	1
27	2	2	3	3	1	1	3	1
28	5	5	1	1	6	6	1	1
29	4	2	1	1	1	1	1	1
30	2	2	1	1	1	1	3	3
31	2	2	3	3	6	6	3	3
32	2	2	1	1	3	3	3	3
33	4	4	1	1	6	6	3	1

34	3	3	1	1	6	3	2	2
35	2	2	1	1	1	1	1	1
36	4	4	2	2	1	1	3	3
37	2	2	1	1	6	3	3	3
38	2	2	1	1	1	1	3	3
Total	N = 34		N = 33		N = 32		N = 34	



## POLEMIK RUUK DIY ; Basis Keistimewaan Kepemimpinan DIY

27/01/2011 08:19:01 Polemik penetapan versus pemilihan sebagai cara pengisian Gubernur/Wagub DIY ke depan pada dasarnya bukanlah polemik orisinal, melainkan sengaja dipolemikkan. Penetapan itu, yang dianggap anti-demokrasi oleh pihak pembikin polemik lebih mewujudkan politisasi. Kejelasan fakta sejarah bahwa lebih dari 60 tahun hal tersebut bukanlah masalah namun sekarang ini dipermasalahkan meniscayakan adanya “batu dibalik udang.” Gubernur, bupati, walikota, ketua RT atau presiden sekalipun belum otomatis pemimpin jika mereka hanya mengandalkan sandaran kepejabatannya melalui mayoritas hasil suatu coblosan. Kuantifikasi hasil dengan cara coblos atau conteng, atau yang tempo dulu dengan cara memasukkan “biting” ke dalam bumbung; dalam bahasa modernnya disebut dengan pemilu atau Pemilukada. Kemenangan ditentukan oleh cacah gundul, gundul sesiapaapun, dengan rumusan yang sangat simplistik, separuh lebih satu—demikian dalil demokrasi barat liberal yang diterima meluas selama ratusan tahun. Namun demikian demokrasi langsung seperti yang maujud dalam sepuluh tahun di negeri ini hanyalah mengkilap di pembungkus kadonya tetapi isinya mengecoh. Demokrasi berisikan sekian tipu muslihat melalui permainan uang, permainan oligarkis atau bahkan tiranis partai dan politik transaksional alias barter politik dan sangat mungkin sekaligus eksperimental dari sebuah politik manipulasi. Bukankah heboh manipulasi DPT pemilu 2008/2009 sepertinya dimulai dari pilkadal Jawa Timur yang dimenangi Sukarwo yang dijagokan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar ? Dalam praktik serba aksesoris itulah demokrasi sulit menghasilkan sebuah kepemimpinan, melainkan cukuplah sebagai pabrik kekuasaan dan kepejabatannya. Demokrasi di negeri kita dalam sejumlah reformasi adalah pabrik pengolah the wrong men in the right place dimana capaian-capaian kekuasaan ditempuh melalui mekanisme anti-demokrasi. Tirani “Duwitologi” dan represi figur tunggal penentu sebuah partai runyam mengendalikan pendidikan politik untuk mencapai keandalan masyarakat sipil. Partai, dengan begitu juga demokrasi, sebagai sarana dan wahana demokratisasi adalah nonsense. Partai hanyalah dominan menjadi alat memburu nafkah dan memperkaya diri, menebar pesona sekaligus dimana mungkin sebagai katrol neofeodalisme dimana “gembel” merajakan diri sedangkan raja sendiri merakyatkan dirinya. Keberantakan substansial demokrasi di negeri kita pun dengan sepenuh kebanggaan disahkan dengan meterai kemajuan betapapun kedaluwarsa dan bahkan palsunya meterai itu. Kedaluwarsa, sebab demokrasi selaku isu modernitas dengan ilmu sebagai penyangganya sudah lama bergerak menuruni lereng krisis. Dan sekaligus palsu, sebab demokrasi tanpa pengelolaan nilai-nilai dasarnya semisal transparansi, rasionalitas, jalan damai, kedewasaan warga negara dan hukum yang adil, bukanlah sejatinya demokrasi. Demokrasi hanyalah alat pembayar yang terlalu mahal dan sangat riskan untuk cuma membeli -

bukan lagi kucing—melainkan “kucing besar dalam karung.” Dewasa ini masih cukup banyak orang memuja- puji apa yang di dalam karung itu sambil berikhtiar menyingkap karungnya sampai datang saat tatkala para pemimpin lintas agama melontarkan konstataasi kebohongan publik. Absurditas dan keremeh-temehan maupun kenaifan politik seperti itulah kini menjamur sekaligus membencana di negeri ini. Rakyat, sekaligus kawula Ngayogyakarta pun kini unjuk rasa damai dengan sikap khas “eling lan waspada,” untuk belum bersedia dijajah oleh bangsa sendiri, model kepenjajahan yang oleh Soekarno disebut jauh lebih keji dari penjajah asing. Diantar oleh kanal-kanal sejarah, budaya, filosofi dan kanal kejuangan, Yogyakarta bergerak menunjukkan epistemologi demokrasi di Indonesia sebagai memang “Demokrasi Indonesia,” yang hanya secara demikianlah bangsa ini sanggup mengindonesiakan Indonesia. Gerakan rakyat yang mayoritas tidak berpendidikan tinggi itu secara kategoris menolak sosialisasi ilmiah sejumlah pakar yang ingin menggeneralisasi paham demokrasi asing untuk Yogyakarta; bahkan Indonesia. Dalam workshop RUUK DIY 19 Januari lalu di Jakarta yang difasilitasi oleh Aliansi Bhinneka Tunggal Ika dan Jaringan Indonesia (JIRA) yang dihadiri secara nasional dengan lima profesor dan seorang mantan diplomat senior, diakui bahwa masalah Yogyakarta yang hendak ditorpedo keistimewaannya —melalui RUUK versi pemerintah— secara hakiki merupakan manifestasi dari usaha mentorpedo Indonesia. Yogyakarta adalah benteng terakhir keindonesiaan; demikian semua peserta sampai- sampai peserta Jawa Timur menjamin, jika keistimewaan Yogyakarta mau dikutak-kutik “Blitar sampai Banyuwangi” siap membela. Peserta asal Kalimantan Tengah, Makassar dan tanah Sunda pun terang benderang mendukung penetapan Ngarsa Dalem dan Sri Paduka Paku Alam. Namun, sejumlah doktor yang bekerja di Yogyakarta justru berketetapan melakukan transformasi Yogyakarta demi Indonesia dengan cara pengisian Gubernur DIY melalui pilkadal atas nama demokrasi; sambil “membuang ke atas” Sultan dan Sri Paduka sebagai Paradya atau Gubernur Utama. Mereka -boleh jadi—telah mendefinisikan Indonesia minus keindonesiaan sehingga alih-alih melakukan transformasi demokrasi atas Yogyakarta sesungguhnya lebih melucuti Yogyakarta dari nada keindonesiaannya. Penulis, boleh kiranya berpegang pada integritas intelektual Pak Daoed Joesoef, yang lama tinggal di Yogyakarta dimana beliau menulis bahwa mengajari rakyat Yogyakarta tentang demokrasi sama saja mengajari ikan berenang. Penulis sendiri dalam sosialisasi draft RUUK oleh DPD RI di gedung DPRD DIY belum lama mengusulkan perubahan redaksional. Bab V pasal 9 (ayat (1) dan (2) draft tersebut bunyinya (dua ayat penulis gabungkan): “Sri Sultan Hamengku Buwono/ Sri Paduka Paku Alam, selain sebagai pemimpin tertinggi di Kasultanan/ Kadipaten menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah/Wakil Gubernur Kepala Daerah DIY.” Waktu itu penulis usul diubah menjadi: ”Sri Sultan Hamengku Buwono/Sri Paduka Paku Alam sebagai pemimpin tertinggi Kasultanan/ Kadipaten adalah

Gubernur/ Wakil Gubernur DIY.” Dengan kata “adalah,” bermakna suatu eksistensi yang sifatnya genus; sedangkan dengan kata “sebagai” maknanya adalah spesies terdampak oleh hukum kausalitas hilir. Pada hal, kemelekatan jabatan gubernur/ wakil gubernur pada kepemimpinan Sultan/ Sri Paduka itu sifatnya bukan hilir melainkan hulu. Dari realitas hulu kepemimpinan - sekaligus kepemimpinan hulu—itulah maka dipertahankannya kemelekatan Sri Sultan terhadap jabatan gubernur dan Sri Paduka terhadap jabatan wakil gubernur oleh kawula Ngayogyakarta; memberikan teladan bahwa seorang gubernur selaku pejabat bukanlah pertama dan terutama penguasa, melainkan pemimpin. Dalam perspektif keadaban, istimewanya kepemimpinan negeri Ngayogyakarta itu adalah bukan mewujudkan kekuasaan berbasis kekuatan (power based power) melainkan kekuasaan berbasis kebudayaan (culture based power). q-g- (2371-2011) \*) Slamet Sutrisno, Pengajar Fakultas Filsafat UGM .





## Sisi Lain Keistimewaan Yogyakarta

29/01/2011 08:10:16 Berdasarkan hasil sidang di DPR RI terkait pembahasan RUUK DIY, pada hari Rabu 26 Januari 2011 kemarin menunjukkan bahwa ambisi pemerintah untuk “menghabisi” keistimewaan Yogyakarta pada sisi politik dan budaya nampak terlihat dengan jelas. Pada sisi politik, apabila kita mencermati sidang kemarin menunjukkan indikasi kuat bahwa pemerintah ingin mereduksi, menjatuhkan dan bahkan merevolusi peran dan kedudukan Sultan di Yogyakarta. Sedangkan pada sisi budaya, pemerintah hanya menganggap Yogyakarta sebatas sebagai provinsi yang sama dengan provinsi yang lain. Keistimewaan Yogyakarta dianggap hanya sekadar warisan sejarah dan budaya pada masa dinasti Sultan Hamengku Buwono IX saja. Di tengah-tengah euforia demokrasi dan pemilihan langsung, suara rakyat sudah tidak lagi menjadi bagian dari esensi demokrasi. Kepentingan penguasa lebih utama daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Pemerintah di bawah kepemimpinan SBY tampaknya sudah mendekati pemerintahan bertangan besi dan ber-rejim pemilihan. Kedaulatan rakyat sudah tidak lagi di tangan rakyat tetapi di tangan partai, penguasa dan pengusaha. Sistem perwakilan yang telah dianut oleh negeri ini telah gugur dengan sendirinya ketika para wakil rakyat dan lembaga perwakilan rakyat lainnya sudah tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lalu apa istimewanya negeri ini?. Sekarang, keistimewaan Yogyakarta tidak pernah dilihat dalam ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Apabila kita cermati bahwa ada sisi lain yang menarik yang dapat menunjukkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang lebih humanis. Hal itu terbukti dari predikat Yogyakarta yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan kalangan masyarakat banyak. Sisi kebhinnekaan Yogyakarta pun terbukti dengan berdirinya berbagai asrama daerah dari Sabang sampai Merauke dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 33 asrama daerah yang dibangun di tanah Yogyakarta. Daerah mana yang ada di Indonesia memiliki asrama daerah yang beragam seperti di Yogyakarta. Sisi lain yang menarik adalah berbagai jenis plat nomor kendaraan yang ada di Indonesia hanya Yogyakarta yang memiliki keanekaragamannya. Apabila mengamati plat nomor kendaraan kita dapat melihat ada berbagai macam ragamnya seperti BG, G, AB, L,R,B,AG,M,S,dll. Hal tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta adalah kota istimewa, banyak mahasiswa dan pelajar membawa kendaraan dari daerah asal mereka dan menyatu dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta karena kecintaan mereka terhadap kota Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta bukan sekadar suatu fakta sejarah dan cerita masa lalu. Tetapi Keistimewaan Yogyakarta dapat terlihat dari denyut kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sesungguhnya Yogyakarta telah menjadi ikon Indonesia mini harusnya mendapatkan penghargaan, perlindungan dan jaminan dari pemerintah tetapi di era pemerintahan SBY malah ingin mencoba untuk mencabut

akar historis dari keistimewaan itu sendiri. Ambisi pemerintah yang tetap menginginkan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta merupakan proses pemaksaan kepentingan yang bersumber dari perlawanan ideologi yang tidak demokratis di suatu negara demokrasi. Dalam hal ini, pemerintah sudah kalah karena dasar yuridis konstitusional dan historis sangat lemah untuk menunjukkan kepentingannya melakukan demokratisasi dengan cara pemaksaan. Fakta lain yang menunjukkan keistimewaan Yogyakarta adalah pergerakan reformasi pada tahun 1997 juga lahir dari rahim kota Yogyakarta, berbagai elemen masyarakat, organisasi, intelektual muda, dan praktisi merapatkan barisnya untuk menggelorakan gerakan reformasi pada masa itu bertitik tolak dari Yogyakarta. Dari sisi kebudayaan, Yogyakarta juga telah berkontribusi bagi pelestarian kebudayaan Indonesia dengan diakuinya beberapa warisan kebudayaan Indonesia sebagai the World Intangible cultural heritage oleh UNESCO seperti Keris, Wayang, huruf ha na ca ra ka, dan Batik. (Bersambung hal 15)-c Beberapa warisan kebudayaan tersebut telah menginspirasi daerah-daerah di Indonesia untuk ikut memperjuangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya diikuti oleh alat musik angklung dari Jawa Barat juga mendapatkan pengakuan oleh UNESCO tahun 2010 sebagai warisan budaya dunia tak benda. Demokrasi dan politik tanpa dilandasi sisi kemanusiaan yang didalamnya mengandung toleransi, kerja sama, kepedulian, dialog dan penghormatan hanya akan menyebabkan disharmonis dan ketegangan. Harmoni bangsa dan integrasi nasional akan terganggu apabila kepentingan politik dari golongan tertentu merusak tatanan masyarakat yang sudah damai, tenang, dan nyaman. Kebutuhan masyarakat dan rakyat tidak hanya untuk sekadar ikut pemilihan tetapi kebutuhan dasar mereka adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, bagaimana mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan jaminan kesehatan yang cukup. Mereka hidup tidak untuk sekali dalam lima tahun dan pada saat pemilu tetapi mereka memerlukan perhatian dan jaminan dari pemerintah akan keberlangsungan kehidupannya. Urusan rakyat bukan untuk pemilihan tetapi bagaimana perut yang lapar bisa di isi dengan makanan. Seharusnya, pemerintah mendengar jeritan dan tangisan rakyat kecil dibandingkan harus memaksakan kehendak rakyat hanya sekadar untuk pemilihan umum. Demokrasi kita sudah keblinge. Demokrasi keblinger adalah demokrasi yang tidak pernah memperhatikan kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat yang saat ini sangat dibutuhkan mereka yaitu: pendidikan yang baik, jaminan kesehatan, kesejahteraan, dan lapangan kerja. Sisi lain keistimewaan Yogyakarta adalah keinginan rakyat untuk tetap bisa menikmati hari esok yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, adanya pendidikan yang murah dan merakyat dan jaminan kesehatan yang lebih baik bukan untuk ikut pemilu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya bisa sehat, cerdas dan waras. Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai daerah istimewa adalah jaminan akan peradaban

manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan merakyat dan demokrasi tidak akan berarti apabila tidak ada kedamaian, kenyamanan, dan keharmonisan. Istimewanya negeri ini ketika masih ada daerah yang istimewa yang tetap menjadi benteng peradaban dan kebudayaan Indonesia. q - c. (2398-2011). \*) Hastangka, Staf Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM.



## Memasuki Babak Pembahasan RUUK DIY ; Perlu Bekal Semangat 'Golong Gilig'

24/01/2011 08:04:06 “Golong Gilig Ambrastha Sikara” demikian bunyi suryasengkala yang ditulis pada sisi dalam (selatan) gapura Pasar Malam Perayaan Sekaten tahun ini. Sebagaimana lazimnya pada tradisi Jawa untuk mengingat tahun terjadinya suatu peristiwa penting digunakanlah sengkalan, bisa sengkalan lamba yang berupa kalimat dan bisa sengkalan memet. yang berupa gambar atau bentuk wujud. Pada sengkalan lamba seperti di atas selain tiap kata diberi makna angka, juga bisa ditafsirkan secara harfiah.

Kata golong-gilig pada awalnya menunjukkan bentuk. Dalam Kamus Bahasa Jawa, golong berarti bulatan, sedangkan gilig berarti bulat panjang (Mangunsuwito: 2002:64:60). Pada akhir-akhir ini sebutan golong-gilig sering terdengar sehubungan dengan wacana pembangunan miniatur tugu asli yang pernah dibangun oleh Hamengku Buwono I namun terpaksa rusak berat digoyang gempa bumi tahun 1867. Mengenai bentuk arsitektur Tugu Golong-Gilig ini aslinya adalah berupa pilar yang di atasnya ada bulatan seperti bola (golong). Secara simbolis mengandung makna manunggalnya manusia dan penciptanya atau rakyat dengan pemimpinnya yang sering disebut dengan manunggaling kawula lan gusti. (Panuju: 2008:111). Dengan bahasa yang lebih sederhana golong-gilig ini mengandung makna semangat keterpaduan dan kebersamaan.

Sementara itu kata hambrastha yang berasal kata brastha dalam Kamus Bahasa Kawi-Jawa diartikan sebagai lebur, sirna atau ical (CF Winter SR: 2000:24). Dapat pula ditafsirkan dengan makna menghilangkan.

Sedangkan kata sikara, dalam Kamus Bahasa Jawa diartikan sebagai mengganggu atau menyiksa.

Dari kalimat yang terangkai pada suryasengkala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu ajakan sekaligus warning perlunya langkah revitalisasi semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini dihadapi oleh masyarakat Yogyakarta. Dirasakan atau tidak pada akhir-akhir ini sebagian besar masyarakat Yogyakarta memang sedang merasa “tersiksa” batinnya.

Pascaerupsi Merapi yang hingga saat ini masih membawa derita belum terselesaikan. Tiba-tiba masyarakat Yogyakarta harus menghadapi kembali kejengkelan tentang masih buramnya pembahasan RUUK-DIY. Dimulai dengan strategi mengulur waktu dan pemunculan berbagai statemen yang melukai hati sebagian besar rakyat Yogyakarta, menandakan adanya indikasi Pemerintah sengaja melupakan andil besar Yogyakarta dalam ikut mempertahankan Kemerdekaan. Walaupun pada saat ini draft RUUK itu telah berada di Senayan, tetapi pasti masih memerlukan proses panjang. Tarik ulur dan perdebatan masih akan terjadi lebih-lebih bila Pemerintah kekeuh memegang pendapatnya bahwa untuk jabatan Gubernur dan Wagub harus melalui pemilihan (KR 11 Jan). Memang di hari-hari menjelang pembahasan RUUK di DPR ada

kesan Pemerintah mulai “melunak”. Sebagaimana disampaikan oleh Mendagri bahwa jika pada akhirnya konsep Pemerintah tidak disetujui, tidak menjadi masalah cukuplah konsep itu menjadi bagian sejarah (KR 18 Jan). Namun apa yang disampaikan Mendagri itu sesungguhnya bukanlah hal baru. Di samping itu yang perlu dipertanyakan adalah statemen ini merupakan pendapat pribadi atautkah merupakan kebijakan pemerintah.

Masa Kritis

Makin molornya durasi pembahasan RUUK pasti akan berimplikasi pada lapisan akar rumput. Kondisi riil yang terjadi di lapangan selain yang pro penetapan ada juga yang menyetujui pemilihan, keduanya memiliki keinginan terjadi ending sesuai harapannya.

Ibarat seorang pasien yang telah berada di meja operasi, makin lama proses operasi itu berjalan akan menimbulkan berbagai kekhawatiran dan spekulasi bagi yang berada di luar kamar operasi. Sehingga tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa tahun ini kita sedang memasuki masa kritis. Menyadari bahwa Pemerintah sebagai pemasok konsep RUUK kemungkinan besar akan “isin mundur”, maka salah satu dambaan yang bisa kita harapkan adalah kepada para wakil rakyat di DPR.

(Bersambung hal 15)-k

Kita percaya masih banyak para wakil rakyat di Parlemen yang akan benar-benar menyuarakan nurani mayoritas masyarakat Yogyakarta untuk memilih penetapan sebagai salah satu substansi keistimewaan DIY. Namun ketika kita memasuki ranah politik apapun bisa terjadi, terkecuali bila para wakil rakyat itu benar-benar golong-gilig manunggaling jiwa dan karsa dengan rakyat yang diwakilinya.

Mensitir ajaran filosof Jawa Ki Ageng Soerjomentaram seyogianya para wakil rakyat itu menanyakan pada diri sendiri : “aku iki sapa lan aku kudu kepiye”. Makna dari pertanyaan itu adalah kesadaran akan status dan kedudukan seseorang serta apa yang harus dilakukan agar punya manfaat bagi orang banyak.

Sampyuh

Hidup di alam demokrasi terjadinya perbedaan pendapat bukanlah hal yang terlarang, demikian halnya ketika menyikapi keistimewaan DIY. Memasuki masa kritis ini alangkah eloknya jika perbedaan pendapat itu bisa dilakukan dengan dewasa dan bijak. Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai daerah yang tata tentrem ayom ayem sudah seharusnya dijaga dari praktik-praktik penekanan, intimidasi bahkan teror yang justru kontra produktif. Setiap langkah destruktif pada ujungnya akan memancing timbulnya konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat Yogyakarta sendiri secara keseluruhan. Memasuki masa kritis perlu kiranya kita berkaca pada tragedi Dora dan Sembada dalam legenda Ajisaka yang akhirnya keduanya harus mati sampyuh. Tentunya bukan itu yang kita harapkan, . q - k. (2346-2011).

\*) Drs Kulup Bono DA,

Pensiunan PNS Republik Indonesia, Rakyat Biasa..

## Mendalami Keistimewaan dan Penetapan

20/01/2011 09:24:52 Ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang terlalu mahal jika hanya berlalu begitu saja. Setiap peristiwa seringkali menjadi hikmah dan momentum untuk memicu gerakan baru. Setiap momentum memberi kita kesempatan memperbaiki kesadaran dan posisi diri, bahkan memungkinkan melampaui posisi dan kondisi sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir kita digoncang dengan berbagai peristiwa. Kita masih ingat tahun 2006 masyarakat Bantul DIY mengalami peristiwa gempa bumi dahsyat yang meluluh lantakan sendi-sendi kehidupan. Peristiwa gempa tersebut juga sebuah momentum untuk memicu perubahan kesadaran dan posisi diri. Dengan kearifan lokalnya masyarakat Bantul bangkit pasca gempa 2006. Namun mereka tidak sekadar bangkit untuk kembali ke titik semula. Rumah-rumah tidak hanya diperbaiki seperti sedia kala. Program rekonstruksi telah memperbaiki konstruksi bagaimana rumah tahan gempa itu seharusnya dibangun. Sekarang kita dapat melihat realitas hasil. Rumah-rumah penduduk di Bantul menjadi relatif lebih asri dan sehat. Lingkungan dan infrastruktur lebih baik. Semua itu telah melampaui titik kondisi sebelum gempa.

Empat tahun pasca gempa, Jogja diberi dua peristiwa yang tidak kalah mencekam, bahkan tidak hanya satu peristiwa, tetapi dua peristiwa yang hampir bersamaan. Peristiwa pertama adalah Erupsi Merapi yang masih berdampak, dan erupsi pembenturan monarki dengan demokrasi yang mengusik ketenangan kawula Ngayogyakarta.

Erupsi Merapi mengantar kita menuju kesadaran baru bagaimana memahami bahasa Merapi seraif mungkin, dan Erupsi Monarki mengantar kita sejenak kembali mendalami arti keistimewaan Yogyakarta. Sama dengan 2006 di Bantul peristiwa ini juga sedang dan akan menjadi momentum penggugah kesadaran diri. Bagaimana kita dapat menjalani transformasi sehingga mampu melampaui kondisi dan posisi sebelum terjadi peristiwa erupsi. Kedua peristiwa itu sungguh mahal harganya. Rasanya terlalu mahal jika kita hanya ingin sekadar kembali sama ke titik semula. Bukan seperti keledai yang lebai. Kita bisa menjadi transformer-transformer yang mampu melihat visi kedepan untuk lebih mendekatkan pada cita-cita hidup bersama. Kita mempunyai sumber daya batin yang memungkinkan terjadinya lompatan yang melampaui titik semula. Sumber daya batin itu berupa keyakinan (belief) yang kuat. Keyakinan akan adanya kesejahteraan yang lahir dari pemahaman hakikat “Manunggaling Kawula Gusti”, “Memayu Hayuning Bawana” serta “Tahta untuk Rakyat”, berikut aktualisasinya dalam konteks kekinian. Momentum untuk “Maneges”

Apa yang sebenarnya istimewa tentang Yogyakarta. Bagaimana jiwa keistimewaan itu dihayati dalam konteks hidup berbangsa saat ini. Menjadi kawula Yogyakarta adalah kebanggaan sekaligus amanah untuk



menjaga semangat kebinekaan dalam NKRI. Yogyakarta menjadi istimewa karena berposisi dalam jajaran NKRI. Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX, tidak menempatkan kata istimewa sebagai tujuan pada dirinya sendiri ( baca; Yogyakarta). Khas dari yang disebut istimewa ada ketika ia berada dalam taburan kebinekaan Indonesia. Hal itu dapat kita baca dalam “ Amanat Sri Paduka Inggeng Sinuwun Kanjeng Sultan” tanggal 5 September 1945 sbb :

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan : Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. ...Dst (Soedarisman, 1984; Purwadi 2010).

Tradisi Jawa mengartikan amanat sebagai sabda (pangandiko), terucap sebagai titah seorang Raja selaku pengemban amanah tertinggi dari hakikat “Manunggaling Kawula Gusti” . Maka Amanat tanggal 5 September 1945 bukan sekadar proses politik, tetapi sabda pandita Ratu yang berdampak bahkan lebih luas secara politis.

Di samping aspek historis, sisi lain istimewanya terletak pada Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Raja sebagai pengemban amanah “Manunggaling Kawula Gusti”. Sebagai pengemban amanah, maka sabda Raja berdaya mengatasi proses politik pada saat sarat dengan tarik ulur kepentingan . Dengan kata lain titah Raja bukan representatif dari suatu pandangan partai politik tertentu.

Pada Pisowanan Agung hari Rabu Kliwon 18 April 2007 Sri Sultan Hamengku Buwono X bersabda menyatakan : 1. Saya berjanji pada orangtua saya tidak boleh punya ambisi apapun kecuali mensejahterakan Rakyat. Janji saya ini, insya Allah, saya pegang sampai mati. 2. Dengan kejujuran dan keikhlasan saya ingin mengabdikan Bangsa karena bangsa saya menghadapi banyak persoalan yang perlu diselesaikan. 3. Dari Jogja ini kita bangun Indonesia Baru dengan peradapan baru. 4. Saya akan tularkan kemajemukan Jogja, yang tidak mempersoalkan agama apapun, karena di Jogja agama apapun tidak bisa memaksakan kehendak agama lain.

Sabda tersebut jelas mengisyaratkan, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada posisi Raja yang mengemban kawula, sehingga segala ambisi yang ada hanyalah semata-mata untuk mensejahterakan rakyat diatas segala konteks kepentingan kelompok.

Dalam amanat 5 September 1945 Sri Sultan HB IX, membahasakan istimewa dalam kerangka NKRI. Amanat tersebut telah menepis stigma mitos monarkis yang serba magis, mitologis yang seolah-olah eksklusif. Keraton dalam realitasnya bisa inklusif lebih adaptif & aspiratif. Oleh karenanya Keraton hadir sebagai simbol, tanda dan sarana pengayom dinamika kehidupan bersama antara Raja dan Kawula, antara kawula dengan kawula serta dinamika internal Keraton dalam keluhuran integritas untuk siap diteladani.

Tahta untuk rakyat adalah komitmen Raja yang bertekad meneladankan cara hidup bersama berdasar atas nilai-nilai adiluhung, yang bersumber

dari prinsip-prinsip keutamaan hidup dijamin kerajaan yang berintegrasi menuju puncak kepenuhannya dalam Pancasila. Jadi keistimewaan adalah wujud tekad bersama antara Kerajaan Ngayogyakarta dan Negara Republik Indonesia untuk membangun kehidupan berbangsa, melalui pengakuan dan penghormatan atas kedudukannya masing-masing. Maka segenap kawula Jogja dapat berseru, “aku kawula Ngayogyakarta yang berbangsa Indonesia”. q-s-(2324-2011).

\*) Harry Cahya, tinggal di Yogyakarta, profesi sebagai trainer pengembangan SDM. Penulis buku ‘Quantum Asset’ (2008). Pemerhati masalah kesejahteraan rakyat.

